



Judul : Proyek gedung baru DPR tak transparan
Tanggal : Kamis, 07 Januari 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Proyek Gedung Baru DPR Tak Transparan

JAKARTA – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai, pengalokasian pembangunan tujuh proyek di DPR tidak transparan. Itu terlihat dari belum ada desain komplit rencana pembangunan kompleks DPR, tetapi anggarannya yakni Rp570 miliar sudah dianggarkan dalam APBN 2016.

“Dalam APBN 2016, DPR berhasil menggolkan sekitar Rp570 miliar untuk pembangunan kompleks DPR,” kata Manajer Advokasi Fitra Apung Widadi dalam keterangannya kepada *KORAN SINDO* kemarin.

Dia menjelaskan, dari anggaran yang sudah masuk dalam APBN 2016 itu dan detailnya dalam Rencana Umum Pengadaan DPR 2016, Fitra menemukan Rp480 miliar untuk pembangunan Gedung DPR dengan metode lelang umum, Rp10 miliar untuk konstruksi dan poliklinik, Rp68 miliar untuk pelaksanaan konstruksi alun-alun demokrasi dengan metode lelang umum, Rp9,1 miliar untuk konstruksi alun-alun demokrasi metode seleksi umum, dan Rp1,7 miliar untuk manajemen konstruksi alun-alun demokrasi dengan metode seleksi umum. “Selain itu, terdapat puluhan miliar lainnya untuk renovasi kamar anak, kamar keluarga di Rumah Jabatan Anggota DPR,” sebutnya.

Dari temuan tersebut terkonfirmasi bahwa desain komplit rencana pembangunan kompleks DPR belum ada. Akhirnya, anggaran dipecah per *item*. Hal ini kemungkinan ada dua hal yakni untuk menghindari kecurigaan publik dan disinyalir untuk bagi-bagi jatah proyek.

Sebelumnya Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono telah memastikan bahwa proses pembangunan gedung baru DPR diawasi oleh tim implementasi dan reformasi parlemen. Tim yang diketuai Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ini akan memastikan pembangunan sesuai rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan sejak awal. “Tim pembangunan itu perlu kontrol dari Dewan, mengawal arah kebijakan renstra. Itu fungsi tim yang pernah dibentuk,” kata Roem. **(rahmat sahid)**